



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Agustus 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 s.d 13.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020; 2. Realisasi APBN TA 2021 s.d Bulan Agustus 2021; 3. Membahas RKA K/L TA 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022;
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS pada hari ini adalah membahas LKPP APBN TA 2020, Realisasi APBN TA 2021 s.d Bulan Agustus 2021, dan Membahas RKA K/L TA 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini ini di tahun mendatang.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BNPP (Basarnas) agar membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2020 secara detail dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan Basarnas tentang capaian serapan APBN TA 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	LEMBAGA	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	BMKG (Per 22 Agustus 2021)	34,19 %	32,13%
2.	Basarnas (Per 24 Agustus 2021)	56,60%	58,47%

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target 2021 dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

4. Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan Basarnas terhadap alokasi anggaran masing-masing Badan dalam RAPBN TA 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-634 /MK.02/ 2021 dan 516/ M.PPN/ D.8/ KU.01.01/ 07/ 2021 Tanggal 23 Juli 2021 Perihal Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2022 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO	LEMBAGA	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	(A-B)
1.	BMKG	3.584.625.798	3.108.611.438	476.014.360
2.	BNPP (Basarnas)	5.182.550.788	1.967.176.959	3.215.373.829

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan Basarnas akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.


5. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan saran Komisi V DPR RI terkait program pembangunan nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi dari daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2021

KETUA RAPAT,



LASARUS

KEPALA BMKG,



DWIKORITA KARNAWATI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,



HENRI ALFIANDI